

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tesis ini, ada beberapa kesimpulan yang ingin penyusun sampaikan :

1. Kebijakan Fiskal APBN 2017 di Indonesia

Realisasi penerimaan hingga semester I APBN 2017 baru mencapai 47 % dari pagu APBN 2017, sementara pada waktu yang sama, pengeluaran sudah mencapai diatas 50%. Ini berakibat membengkaknya jumlah defisit anggaran maupun keseimbangan primer serta prosentase terhadap PDB. Hal ini membuat pemerintah harus melakukan kebijakan fiskal berupa terus berhutang dan memotong/memangkas pagu anggaran pengeluaran terutama di kementerian/lembaga untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan APBN.

2. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal khususnya dalam pengelolaan anggaran keuangan yang dilakukan di Indonesia sampai saat ini masih belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Kebijakan defisit anggaran yang mengalokasikan jumlah pengeluaran lebih besar dari pada jumlah penerimaan bertolak belakang dengan kebijakan fiskal pengelolaan anggaran perspektif ekonomi Islam yang tidak mengenal defisit, karena harus berprinsip bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan apabila ada penerimaan.

3. Mewujudkan Kesejahteraan

Dengan masih tingginya jumlah angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia belum sejahtera, yang disebabkan pengelolaan anggaran negara yang terutama dalam melaksanakan kebijakan yang belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya selain disebabkan tidak sinerginya pelaksana pemerintahan, juga situasi sosial politik yang lebih dominan daripada sosial ekonomi dalam berbangsa dan bernegara.

Pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa serta kebijakan satu harga di seluruh Indonesia, merupakan salah satu upayaindikator pemerintah telah melaksanakan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan merubahnya menjadi pemerataan distribusi barang maupun distribusi pendapatan. Jika dikelola dengan benar dan baik serta dukungan dari semua komponen bangsa “dengan tidak mengedepankan politik kekuasaan”, kebijakan fiskal di Indonesia memiliki potensi untuk membuat rakyatnya sejahtera baik sejahtera dalam konsep ekonomi konvensional maupun sejahtera dalam konsep ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut :

1. Strategi kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal dalam jangka menengah dengan membuat penerimaan negara lebih pasti dan memberi momentum bagi bisnis untuk berkembang. Kebijakan

pajak pun harus dapat memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak serta diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang yang memiliki *eksrternalitas* negatif.

2. Negara harus membuat mekanisme pemasukan dan pengeluaran keuangan dan harta negara dan tidak terserah kepada pemerintah dalam membiayai belanja Negara dari besaran anggaran yang sudah disetujui parlemen (DPR). Dilihat dari sisi ini saja sudah muncul kerancuan penggunaan keuangan Negara dalam hal alokasi anggaran.
3. Karena itu kebijakan fiskal didalam Islam didasari oleh suatu politik ekonomi, yang bertujuan mencapai distribusi ekonomi yang adil, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer per individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu diantara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya